

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KINERJA BENDAHARA PENGELUARAN

Nurrahmah Putry
putry0701@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Sampel penelitian ini adalah Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu pada OPD yang telah mempunyai pengalaman sebagai bendahara selama 2 tahun sebanyak 82 orang. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kinerja bendahara pengeluaran.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Bendahara Pengeluaran.

Abstract: This research aim to examine the effect of government internal control system (gics) on financial administrator performances. The sample of this research is financial administrator and financial administrator assistant of OPD Bengkulu City who has two years experience, a total of 82 respondents. This research data collection technique was obtained through a questionnaire given to financial administrator and financial administrator assistant. The result shows that government internal control system (gics) has a positive and significant effect to financial administrator performances.

Key words: Government Internal Control System, Financial Administrator Performance.

Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membuat beberapa perubahan yang mendasar di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, termasuk dalam manajemen keuangannya. Pengelolaan pemerintahan yang selama tersentralisasi di pemerintah pusat, sekarang beralih ke konsep desentralisasi, dimana daerah mempunyai wewenang dalam mengelola daerahnya. Pemerintah mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam mengurus dan mengelola pemerintah daerahnya dengan meningkatkan potensi dan kemampuan daerah dalam melakukan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun tertentu. APBD menyajikan informasi rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. APBD merupakan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. APBD mempunyai fungsi yaitu: (a) fungsi otorisasi, (b) fungsi perencanaan, (c) fungsi pengawasan, (d) fungsi alokasi, (d) fungsi distribusi, dan (e) fungsi stabilisasi.¹

Betapa pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan tidak lepas dari peran dan kinerja dari seorang bendahara dan manajemen keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan tak lepas dari peran serta bendahara pengeluaran OPD sebagai titik awal keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dianggap penting karena

¹ Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.

dianggap sebagai pengendali dan penentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu tolak ukur penilaian pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Faktor individu dapat berupa kemampuan, keterampilan, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan tingkat demografi seseorang. Faktor psikologis berupa persepsi, peran, sikap, kepribadian, disiplin, motivasi, dan kepuasan kerja. Sedangkan faktor organisasi dapat berupa struktur organisasi, daerah pekerjaan, kepemimpinan, dan sistem penghargaan.² Terdapat tiga hal yang mempengaruhi kinerja, yaitu motivasi, disiplin, dan kepuasan (faktor psikologis). Faktor psikologis merupakan salah satu yang mampu mempengaruhi kinerja pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena tuntutan pekerjaan yang ada akibat terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan terutama dalam pengelolaan keuangan. Perkembangan sekarang dalam peningkatan kinerja pegawai lebih mengarahkan kepada peningkatan yang dipicu dari dalam diri sendiri. Peningkatan kinerja yang dipicu dari dalam diri sendiri jauh lebih efektif dibanding yang lain apalagi pegawai pada pemerintah daerah.³

Kinerja pengelola keuangan daerah (bendahara pengeluaran) adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai oleh pengelola keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja (*performance*) dalam arti yang sederhana adalah prestasi kerja.⁴ Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Potensi sumber daya manusia tidak ada gunanya jika tidak pernah direalisasikan. Dukungan manajemen sumberdaya manusia teknis dalam mencapai kompetitif strategis (pencapaian kinerja) perusahaan atau organisasi meliputi aktivitas *human investment* untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia yang terkait dalam *people related bussiness issue*.⁵ Kinerja dapat didefinisikan melalui kecermatan, tanggung jawab, tenggang waktu, hasil kerja dan manajemen kerja. Permasalah kinerja dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pemanfaatan waktu yang efisien, kondisi emosi, dan kejenuhan.⁶

Untuk mampu melakukan pengelolaan dengan baik terhadap manajemen keuangan daerah, diperlukan kualitas sumberdaya manusia (termasuk bendahara pengeluaran) yang baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Penelitian ini mencoba melihat faktor apa saja yang mampu mempengaruhi dan meningkatkan kinerja pengelola keuangan daerah. Faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan baik di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan instansi pemerintah akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, hal ini dikarenakan SPIP mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai yaitu (1) kegiatan yang efektif dan efisien, (2) laporan keuangan yang dapat diandalkan, (3)

² Gibson, J.I. Ivanevich, J.M. dan Donnelly, J.H. 1997. *Organisasi Perilaku, Struktur Dan Proses*. Terjemahan. Jilid I. Penerbit Binarupa Aksara. Jakarta

³ Listianto, Toni dan Bambang Stiaji. 2007. *Pengaruh Motivasi, Kepuasan, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁴ Wasistiono, S., 2002. *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁵ Martoyo, S., (2010). *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta

⁶ Mowdey, et. al. (1982). *The Measurement of organization commitment Journal of Vocational Behavior*, No. 14. Hal. 224-247

pengamanan asset negara, dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi, dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Implementasi SPIP dengan semua unsurnya akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada.⁷

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.⁸ Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, artinya semakin baik penerapan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk bagi bendahara pengeluaran di pemerintah daerah, maka akan semakin baik pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan baiknya kinerja pengelola keuangan daerah (salah satunya bendahara pengeluaran).⁹ Penerapan SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.¹⁰ Penerapan SPIP dengan kelima dimensinya akan mampu mempengaruhi pengelolaan keuangan dengan baik termasuk membangun budaya kerja dengan berdasarkan aturan yang berlaku sehingga kinerja pengelola keuangan daerah (bendahara pengeluaran) juga semakin baik. Bendahara pengeluaran berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah

sebagai ujung tombak dalam proses realisasi anggaran, untuk itu dibutuhkan kemampuan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana SPIP memberikan mekanisme, panduan, dan rambu-rambu yang harus dilakukan.

Penelitian ini akan dilakukan di pemerintah Kota Bengkulu. Kondisi yang ada di pemerintah kota Bengkulu adalah banyaknya keterlambatan realisasi anggaran atau pelaksanaan anggaran dan tidak baiknya pelaporan keuangan mengindikasikan belum baiknya kinerja. Serapan anggaran kota Bengkulu tahun anggaran 2016 rendah, rendahnya serapan anggaran ini salah satunya diduga karena belanja anggaran yang tak sesuai target. Hal ini berimbas pada banyaknya mata anggaran yang akhirnya tidak dapat digunakan ataupun direalisasikan, baik itu karena ditunda pelaksanaannya atau bahkan dibatalkan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu pada tahun Anggaran 2012-2016 memperoleh opini BPK berturut turut dalam posisi yang sama yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP ini menunjukkan bahwa ada hal yang menjadi temuan membutuhkan perbaikan dan mendapatkan perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan dan opini tersebut menjadikan pemerintahan kota Bengkulu pada setiap OPD nya harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan meningkatkan ke arah yang lebih baik termasuk dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), perbaikan dalam kemampuan pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola keuangan daerah, peningkatan penerapan SPIP dengan baik pada semua OPD yang ada. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran”**.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi pemerintah kota Bengkulu dalam memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik, serta dapat berguna sebagai referensi yang bermanfaat dan dapat menjadi bahan kajian yang lebih

⁷ Mardiasmo.2010. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (online). Sumber: <http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2037665-kinerja-pemerintah-daerah/#ixzz2BL0FgvdS>

⁸ Slamet, Dodik Pujiono. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10, NO 1 Januari 2016 Hal. 68-81.

⁹ Gloria, Sinambow Injilita Bulan, dkk. (2017). *Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1),2017,263-271.

¹⁰ Nugraha, D.S. (2010). Pengaruh Sitem Pengendalian Intern dan Reliabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* Vol.2, No.2, November 2010, 258-278.

mendalam bagi para peneliti lainnya khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang akan melakukan penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik.

Kajian Pustaka **Stewardship Theory**

Stewardship Theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih kepada tujuan utama untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi.

Teori ini dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini digunakan oleh para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principal*-nya.¹¹ Teori ini dapat digunakan untuk melihat perilaku pengelola keuangan daerah (bendahara pengeluaran) terkait motivasinya dalam bertindak untuk kepentingan pemilik pemerintah daerah yaitu masyarakat.

Berkaitan dengan isu penelitian ini melihat pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terhadap kinerja pengelola keuangan daerah (bendahara pengeluaran), hal ini mengisyaratkan bahwa bendahara pengeluaran (*steward*) akan dapat dimotivasi meningkatkan kinerjanya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Bendahara OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian Terdahulu dan Perumusan

Hipotesis

Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu penelitian ini antara lain:

- a. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi terhadap kinerja pengelola keuangan dan pengaruh pemahaman penatausahaan terhadap kinerja pengelola keuangan pada sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan namun pemahaman penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola keuangan daerah.¹²
- b. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja OPD pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja OPD. Sedangkan secara parsial penatausahaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja OPD.¹³
- c. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan Daerah terhadap kinerja pengelolaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. Hasil penelitian menunjukkan

¹² Sari, Erna, (2013). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pemahaman penatausahaan keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah*, Tesis Tidak Dipublikasikan. Program Magister Akuntansi, Universitas Bengkulu.

¹³ Ratih, Asri Eka. (2012). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*. Tesis Tidak dipublikasikan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.

¹¹ Donaldson dan Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return*. Australian Journal of Management.

- bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan, dan pengelolaan keuangan juga berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pengelolaan keuangan di Kabupaten Lebong.¹⁴
- d. Pengaruh sistem pengendalian intern dan reliabilitas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini adalah sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.¹⁵
 - e. Pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel penelitian ini adalah pengelola keuangan OPD, metode analisisnya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.¹⁶
 - f. Kompetensi bendahara pengeluaran sesuai dengan syarat pengangkatan pada Peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN. Hasil penelitian ini bendahara pengeluaran seharusnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, minimal syarat pengangkatannya.¹⁷
 - g. Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja OPD, menganalisis pengaruh pemahaman penatausahaan keuangan daerah terhadap kinerja OPD, serta menganalisis pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kinerja OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi, penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah secara simultan menunjukkan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Pemahaman penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja OPD pada pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.¹⁸

Perumusan Hipotesis **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kinerja Bendahara Pengeluaran**

Stewardship Theory adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih kepada tujuan utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini digunakan untuk melihat perilaku pengelola keuangan daerah (bendahara pengeluaran) terkait motivasinya dalam bertindak untuk kepentingan masyarakat. Pengelola keuangan daerah (bendahara pengeluaran) memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Penerapan SPIP dengan semua dimensi yang ada di pemerintah daerah akan memberikan panduan dan dukungan dalam bentuk aturan dan administrasi pemerintahan yang baik sehingga bendahara pengeluaran (sebagai *steward*) akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya (berkinerja baik) untuk kepentingan masyarakat banyak. Bendahara pengeluaran sebagai *steward* akan berperilaku kolektif, sebab *steward* berpedoman dengan perilaku tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Batu.

¹⁴ Nataliana, Rika. (2015). *Pengaruh Pemahaman sistem akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program magister Akuntansi, Universitas Bengkulu.

¹⁵ Nugraha, D.S. (2010). Pengaruh Sitem Pengendalian Intern dan Reliabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* Vol.2, No.2, November 2010, 258-278.

¹⁶ Rosdini, D. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

¹⁷ Andhayani, Atik. (2014). *Kompetensi Bendahara Pengeluaran Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Aparatur*

¹⁸ Abdullah, Syukriy., Mukmin & Darwanis. (2015). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman penatausahaan keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara*, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala* Vol 4 No. 2.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan.¹⁹ Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola keuangan daerah.²⁰ Selanjutnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.²¹ Semua hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa semakin baik penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan kelima dimensinya (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan) maka akan mampu meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan efektif apabila pengelolanya (bendahara pengeluaran) mempunyai kinerja yang baik, dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

SPIP memberikan panduan kepada pimpinan OPD dan semua staf yang ada termasuk pengelola keuangan daerah (bendahara pengeluaran) dalam bertindak menjalankan organisasi pemerintahan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tujuan organisasi. SPIP memberikan panduan bagi bendahara pengeluaran bagaimana bertindak dan melakukan manajemen administrasi yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan SPIP membuat bendahara pengeluaran memahami berbagai mekanisme yang harus dilakukan. Bendahara pengeluaran memahami berbagai konsekuensi yang akan muncul apabila tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab

sesuai mekanisme yang ada yang berkaitan dengan penerapan SPIP. Bendahara pengeluaran akan memperbaiki dirinya dan meningkatkan kemampuannya untuk dapat melaksanakan berbagai tugas yang ada sesuai lingkup tanggungjawabnya. Penerapan SPIP diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja bendahara pengeluaran. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kinerja bendahara pengeluaran

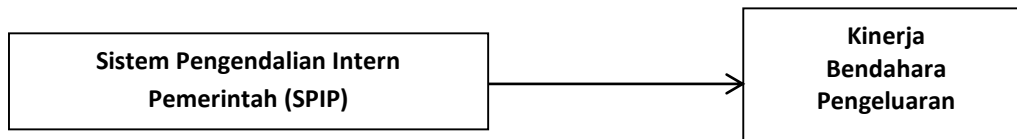
¹⁹ Nugraha, D.S. (2010). Pengaruh Sitem Pengendalian Intern dan Reliabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* Vol.2, No.2, November 2010, 258-278.

²⁰ Rosdini, D. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

²¹ [Slamet, Dodik Pujiono. \(2016\). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah \(Studi di Provinsi Maluku Utara\). Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10, NO 1 Januari 2016 Hal. 68-81.](#)

Kerangka Analisis

Berdasarkan pembahasan konsep dan studi empiris yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, maka kerangka analisis pada penelitian adalah:



Metode Penelitian

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kinerja Bendahara Pengeluaran(Y)

Kinerja bendahara pengeluaran adalah suatu hasil yang dicapai dalam suatu kegiatan/program sesuai dengan standar yang terukur dan telah dirumuskan sebelumnya. Indikator kinerja yang baik memiliki sifat memotivasi dan mengarahkan untuk mencapai hasil terbaik.

Variabel ini diukur dengan 12 item pernyataan dengan menggunakan skala *likert* yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Cukup Setuju (CS) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₁)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah: Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel ini diukur dengan 25 item pernyataan dengan menggunakan skala *likert* yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Netral (N) dengan skor 3, Setuju (S) dengan skor 4, Sangat Setuju (SS) dengan skor 5.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan tiap konstruksinya dikatakan valid apabila signifikan pada level 0,05.

Uji Reliabilitas

Keandalan item pertanyaan dianggap cukup, jika nilai koefisien variabel *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu yang berjumlah 41 OPD. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Metode *purposive Sampling*. Sampel penelitian ini adalah Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu pada OPD yang telah mempunyai pengalaman sebagai bendahara selama 2 tahun.

Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner.

Metode Analisis dan Uji Hipotesis

Tahapan-tahapan dalam analisis Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai data penelitian berupa jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Untuk melihat tinggi/rendah atau baik/buruknya variabel penelitian.

Dimana *range* nilai 1,00-1,80 berarti sangat buruk atau sangat rendah, *range* nilai 1,81-2,60 berarti buruk atau rendah, *range* nilai 2,61-3,40 berarti sedang, *range* nilai 3,41-4,20 berarti baik atau tinggi dan *range* nilai 4,21-5,00 berarti sangat baik atau sangat tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, yaitu *Kolmogorov-Smirnov Test*. Dengan nilai signifikan $> 0,05$ maka data mempunyai distribusi normal.²²

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pada multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *varian inflantion* (VIF). Artinya, apabila nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Sebaliknya, jika *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak akan terjadi multikolinearitas antara variabel independen.²³

Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser* dengan probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ atau $0,05$.²⁴

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (*Multiple Linier Regresion*) yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan persamaan

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + E$$

Dimana :

- Y = Kinerja Bendahara Pengeluaran
- α = Konstanta
- X_1 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- X_2 = Pemahaman Penatausahaan Keuangan Daerah
- β = Koefisien regresi variabel bebas
- E = Error

Untuk melihat apakah model regresi yang ada dalam penelitian ini telah fit (layak), maka dilihat nilai F. Apabila F signifikan dengan derajat kepercayaan 95% ($0,05$) maka model regresi telah layak atau fit. Selanjutnya dilakukan pengujian Koefisien Determinasin (R^2) yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel terikat. Selanjutnya, untuk melihat arah pengaruh maka dilihat koefisien regresi. Apabila koefisien regresi positif berarti pengaruh positif dan apabila koefisien regresi negatif berarti pengaruh negatif.

Hasil Dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 4.5
Deskriptif Statistik

Variabel	N	Mean	Std. Deviation
Kinerja Bendahara Pengeluaran	76	4,23	0,344
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	76	3,99	0,403

Sumber : Data Primer diolah, 2018

²² Ghazali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBN SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

²³ Ghazali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBN SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

²⁴ Ghazali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBN SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

Keterangan:

1. 1,00 – 1,80 = Sangat Buruk/Rendah
2. 1,81 – 2,60 = Buruk/Rendah
3. 2,61 – 3,40 = Sedang
4. 3,41 – 4,20 = Baik/Tinggi
5. 4,21 – 5,00 = Sangat Baik/Tinggi

Berdasarkan statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa variabel kinerja bendahara pengeluaran memiliki rata-rata aktual (*mean*) sebesar 3,99 berada pada *range* nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa kinerja bendahara pengeluaran di OPD Kota Bengkulu sudah baik. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki rata-rata aktual (*mean*) sebesar 4,16 berada pada *range* nilai 3,41-4,20 dengan demikian dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sudah baik.

Uji Validitas

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas

Nama Variabel	n	Coefficient correlation pearson	Signifikan	Keterangan
Kinerja Bendahara Pengeluaran (Y)	76	0,522** - 0,711**	0,000–0,000	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	76	0,358** - 0,788**	0,000 – 0,000	Valid

*.Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed)

**.Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Uji Reliabilitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kinerja Bendahara Pengeluaran (Y)	0,854	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	0,931	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Pengujian Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogrov-Smirnov-Test	Asymp. Sig. (2 tailed)	Keterangan
Kinerja Bendahara Pengeluaran (Y)	1,326	0,060	Normal
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	0,633	0,818	Normal

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	0,686	1,457	Bebas Multikolonieritas

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.10
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X ₁)	0,073	Bebas Heterokedastisitas

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien β	Nilai Koefisien	Std.Error	Nilai t	Sig	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₁)	β_1	0,161	0,045	3,587	0,001	Diterima
Adjusted R²	0,385					
F-hitung		24,517			0,000	Fit (Layak)
t-tabel		1,991				

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan, pada Tabel 4.11 diperoleh nilai F = 24,517 dengan nilai signifikansi sebesar P value = 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan variabel mampu menjelaskan fenomena bagaimana kinerja bendahara pengeluaran di OPD Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tabel 4.11 terlihat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) = 0,385. Hal ini mengandung pengertian bahwa 38,5 % variabel kinerja bendahara pengeluaran dapat dijelaskan oleh variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X₁) sedangkan sisanya sebesar 61,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian.

Tingkat signifikansi variabel sistem pengendalian intern pemerintah (0,001) kurang dari tingkat signifikan ($\alpha < 0,05$). Maka dapat disimpulkan hipotesis 1 **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bendahara pengeluaran dengan nilai ($\beta = 0,161$). Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik kinerja bendahara pengeluaran.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Hal ini berarti semakin baik tingkat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) maka semakin baik kinerja bendahara pengeluaran.

Hal ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan

penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola keuangan daerah.²⁵ Selanjutnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.²⁶ Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.²⁷

Penutup

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang ada pada setiap OPD di Kota Bengkulu, maka semakin baik kinerja bendahara pengeluaran OPD di Kota Bengkulu.

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk memahami bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern

²⁵ Rosdini, D. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

²⁶ Slamet, Dodik Pujiono. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10, NO 1 Januari 2016 Hal. 68-81.

²⁷ Gloria, Sinambow Injilita Bulan, dkk. (2017). *Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1),2017,263-271.

pemerintah (SPIP) terhadap kinerja bendahara pengeluaran (studi pada organisasi perangkat daerah di kota Bengkulu). Apa yang harus dilakukan oleh pihak terkait untuk meningkatkan kinerja bendahara pengeluaran yaitu melalui: 1) penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik dengan cara membentuk lingkungan pengendalian yang baik, mengefektifkan penilaian risiko, mengefektifkan kegiatan pengendalian, menjalankan informasi dan komunikasi yang baik, dan intens secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pemantauan pengendalian intern. 2) meningkatkan pemahaman penatausahaan keuangan daerah dengan cara melakukan mekanisme pendapatan, belanja, pembiayaan, asset dan kewajiban daerah yang berisi ketentuan, prosedur, dan mekanisme tertentu dengan baik untuk memberikan pengelolaan yang baik.

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi dan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kinerja bendahara pengeluaran. Penelitian ini mendukung Teori *stewardship*, dimana Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih kepada tujuan utama untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi. Teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu bendahara pengeluaran (*steward*) akan dapat dimotivasi meningkatkan kinerjanya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang mempengaruhi kinerja bendahara pengeluaran OPD di Kota Bengkulu, sementara faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja bendahara pengeluaran relatif banyak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja bendahara pengeluaran, seperti motivasi dan transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dapat melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Bengkulu untuk memaksimalkan penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy., Mukmin & Darwanis. (2015). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman penatausahaan keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara*, Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala Vol 4 No. 2.
- Andhayani, Atik. (2014). *Kompetensi Bendahara Pengeluaran Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Pemrintah Kota Batu*.
- Anggraini.Y., Puranto.H., (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Arikunto,S . (2002). *Prinsip-prinsip Evaluasi Pendidikan*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Baswir, Revrisond. (2002). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Chabib, Soleh. (2009). *Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah*. Fokus Media, Bandung.
- Darmawan, Nyoman, dkk. (2015). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*, e-Journal Vol 3 No. 1.
- Dessler, G., (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Prehalindo, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit UI-Press.
- Donaldson dan Davis. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return*. Australian Journal of Management.
- Gibson, J.I. Ivanevihch, J.M. dan Donelly, J.H. (1997). *Organisasi Perilaku, Struktur Dan Proses*. Terjemahan. Jilid I. Penerbit Binarupa Aksara. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2011), *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 16*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.
- Gloria, Sinambow Injilita Bulan, dkk. (2017). *Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1), 2017, 263-271.
- Hasanah, Maya Uswatun, (2008). *Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja*. Universitas Bengkulu.
- Hidayat, Rahmat. (2015). *Pengaruh Pengelolaan keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah : Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman*. *Artikel Ilmiah*, Universitas Negeri Padang.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Listianto, Toni dan Bambang Stiaji, (2007). *Pengaruh Motivasi, Kepuasan, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan*. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo, (2010). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* (online). Sumber: <http://id.shvoong.com/business-management/humanresources/2037665-kinerja-pemerintah-daerah/#ixzz2BL0FgvdS>
- Mardiasmo, (2005). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, (2002). *Telaah Kritis terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Unisia*. Nomor 46/XXV/III/2002.
- Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Martoyo, S., (2010). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin. (2004). *Hubungan Antara Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja Karyawan Operator Shaving Computer Bagian Produksi pada PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk Bandung*.
Artikel <http://www.google.com>.
- Mowdey, et. al. (1982). *The Measurement of organization commitment Journal of Vocational Behavior*, No. 14. Hal. 224-247.
- Nataliana, Rika. (2015). *Pengaruh Pemahaman sistem akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pengelola Keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program magister Akuntansi, Universitas Bengkulu.
- Noviantika, Resi. (2016). *Pengaruh Penatausahaan dan Kompetensi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana Magister Manajemen.
- Nugraha, D.S. (2010). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Reliabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* Vol.2, No.2, November 2010, 258-278.
- Noordiawan. D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Noordiawan, Putra, Rahmawati, (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ratih, Asri Eka. (2012). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau*. Tesis Tidak dipublikasikan, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Robbins, Stephen P. (2008). *Perilaku Organisasi*, Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Rosdini, D. (2011). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*.
- Republik Indonesia, (2011). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2004). *Undang-undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.

- Republik Indonesia, (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2004). *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Pergaulan.
- Republik Indonesia, (2004). *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Republik Indonesia, (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2006). *Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.
- Republik Indonesia, (2011). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta.
- Republik Indonesia, (2011). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Sari, Erna, (2013). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pemahaman penatausahaan keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah*, Tesis Tidak Dipublikasikan. Program Magister Akuntansi, Universitas Bengkulu.
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Serapan Anggaran Pemprov Bengkulu 72,33 Persen (2017) (online) tersedia di World Wide Web: <http://www.rmolbengkulu.com/read/2017/12/29/5811/serapan-anggaran/>
- Serapan APBD Provinsi TA 2016, 2018 (online) tersedia di World Wide Web: <http://rbtv.co.id/serapan-apbd-provinsi-ta-2016-rendah/>
- Slamet, Dodik Pujiono. (2016). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10, NO 1 Januari 2016 Hal. 68-81*.
- Sugiyono, (2012). *Metode penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo. (2008). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, S., (2002). *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, Remadja Rosdakarya, Bandung.